



**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA,PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN  
AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI  
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH : Studi Pada Pemerintah Kabupaten  
Kudus**

Diajukan oleh:  
**ZULIARTI**  
**2008-12-082**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2012**



**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA,PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN  
AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI  
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH : Studi Pada Pemerintah Kabupaten  
Kudus**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan  
Srata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muria Kudus

Diajukan oleh:

**ZULIARTI**

**2008-12-082**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2012**

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN  
PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI  
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus**

Skripsi ini telah disetujui dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 Oktober 2012

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Pembimbing I

**Ashari, SE, Akt, M.Si**  
NIS. 0610701000001162

**Dra. Hj. Ponny H., M.Si, Akt**  
NIS. 0610701000001139

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing II

**Drs. M. Masruri, MM**  
NIS. 0610702010101002

**Nafi Inayati Zahro, SE. M.Si,**  
NIS. 0610701000001206

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “  
(QS. Ar Ra’dad Ayat 11)*

*“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang.  
Jika memulai sekarang,  
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui,  
dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu”  
(William Feather)*

*“ Kegigihan adalah kekuatan yang tidak terlihat yang bisa menyingkirkan rintangan-rintangan besar”  
(David Herbert Lawrence)*

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang telah melahirkanku  
dan selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, nasehat,  
ketulusan dan doa yang tidak pernah putus  
serta menjadi guru sepanjang hidupku.

*Aku bersyukur jadi putrimu.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : ” **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus**”. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sadar bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. M. Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Dra. Hj. Ponny H., M.Si,Akt selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta dengan kesabarannya memberikan bimbingan, arahan, dan saran pada peneliti sampai selesainya skripsi ini.

3. Ibu Nafi Inayati Zahro, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan, arahan, dan saran pada peneliti sampai selesainya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Bapak Mas'uth SH., M.Hum selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus yang telah mengizinkan dan membantu proses pelaksanaan penelitian ini.
6. Seluruh pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua ku, Bapak Sumardi dan Ibu Taminah, yang tidak henti-hentinya berdoa, memotivasi, dan memberi semangat untuk selalu bangkit serta mencurahkan segala perhatiannya bagi penulis serta adik-adikku.
8. Teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2008 khususnya ( Mona, Mun, Alam, Fery, Ngatono, Lilis, Sikha, Mbak Ana, Errni, Halimah dll) dan Mba Fatin, Mas Wahyu, Dek Iwan, Ngatemin, Fariq dan para staf di SKPD Kabupaten Kudus atas bantuannya dalam penyebaran kuesioner.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Kudus,

2012

**ZULIARTI**

NIM. 2008-12-082

## ABSTRAKSI / RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai informasi tersebut meliputi keterandalan dan ketepatanwaktuan, dimana faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan bagian keuangan paada SKPD pemerintah kabupaten Kudus. Dari 102 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 76 responden yang dapat dimasukkan dalm pengolahan data. Analisis data menggunakan program SPSS versi 12.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan kapasitas SDM tidak berpengaruh. Kedua, baik kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : *Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.*

## ABSTRACT

*This research aims is to know factors that influence information value of local government financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness, whereas factors that influence are human resource capacity, information technology utilization, and accounting intern control.*

*Respondents were the Chief of some office in Kudus Government. Out of 102 Questionnaires distribution, 76 usable responses were gathered. Data were analysed by SPSS program in 12.0 Version. The statistic method used to test the hypotheses was multiple linier regression.*

*Hypotheses testing results are as follows. First, information technology utilization and accounting intern control have a positive and significant influence on reliability of local government financial reporting, while human resource capacity has no influence. Second, both of human resource capacity and information technology utilization have positive and significant influence on timeliness of local government financial reporting*

**Keywords:** *Local government financial reporting, Information value, Human resource capacity, Information technology utilization, and Accounting intern control.*





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO .DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
RINGKASAN / ABSTRAKSI .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	11
1.3. Perumusan Masalah .....	12
1.4. Tujuan Penelitian .....	12
1.5. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 Teori Kepatuhan.....	15
2.1.3 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Kapasitas SDM .....	18
2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	19

	Halaman
2.4. Pengendalian Intern Akuntansi.....	20
2.5. Nilai Informasi.....	22
2.6. Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	24
2.7. Pengembangan Hipotesis .....	25
2.7.1. Hubungan kapasitas SDM dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	25
2.7.2. Hubungan Pemanfaatan TI dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	27
2.7.3. Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	29
2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	30
<b>BAB. III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	31
3.1.1. Variabel Independen .....	34
3.1.1.1 Sumber Daya Manusia.....	34
3.1.1.2 Pemanfaatan TI.....	35
3.1.1.3 Pengendalian Intern Akuntansi.....	35
3.1.2. Variabel Dependen.....	36
3.1.1.1 Nilai Informasi.....	36
3.2. Populasi dan Sampel .....	36
3.3. Jenis dan Pengumpulan Data.....	39
3.4. Meetode Analisis Data.....	40
3.4.1. Uji Reabilitas.....	40

	Halaman
3.4.2. Uji Validitas.....	40
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	40
3.5. Analisis Deskriptif.....	43
3.5.1. Uji Regresi.....	43
3.5.2. Uji t.....	44
3.5.3. Uji F.....	45
3.5.4. Koefisien Determinasi.....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Gambaran Umum Obyek .....	47
4.2. Deskripsi Responden.....	50
4.2.1. Jenis	51
Kelamin.....	51
4.2.2. Umur Responden.....	52
4.2.3. Latar Belakang Pendidikan.....	52
4.2.4. Lama Bekerja.....	53
4.3. Deskriptif Data.....	55
4.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen.....	55
4.4.1. Uji Validitas .....	57
4.4.2. Uji Reliabilitas .....	57
4.5. Uji Asumsi Klasik .....	57
4.5.1. Uji Asumsi Klasik Regresi Pertama.....	57
4.5.1.1. Uji Normalitas.....	58
4.5.1.2. Uji Multikolinearitas.....	59

	Halaman
4.5.1.3. Uji Autokorelasi .....	61
4.5.1.4. Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.5.2. Uji Asumsi Klasik Regresi Kedua.....	62
4.5.2.1. Uji Normalitas.....	63
4.5.2.2. Uji Multikolinearitas.....	64
4.5.2.3. Uji Autokorelasi.....	65
4.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.6. Analisis Regresi.....	67
4.6.1. Analisis Regresi Pertama.....	69
4.6.1.1. Uji Kelayakan Model.....	71
4.6.1.2. Pengujian Hipotesis.....	72
4.6.2. Analisis Regresi Kedua.....	75
4.6.2.1. Uji Kelayakan Model.....	76
4.6.2.2. Pengujian Hipotesis.....	79
4.7. Pembahasan .....	79
BAB V. PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan .....	82
5.2 Keterbatasan.....	83
5.2. Saran .....	
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Matrik Penelitian Terdahulu .....	16
2.2. Definisi dan Rumusan Kualitas Informasi.....	23
2.3. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah .....	24
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
4.1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuessioner.....	40
4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
4.3. Gambaran Usia Responden.. .....	52
4.4. Gambaran Latar Belakang Pendidikan.....	52
4.5. Gambaran Lama Bekerja.....	53
4.6. Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	53
4.7. Hasil Uji Validitas.....	55
4.8. Hasil Uji Reliabilitas.....	57
4.9. <i>One Sample Kolmogorov –Smirnov Test</i> .....	58
4.10. Hasil Uji Multikolinieritas .....	59
4.11. Hasil Uji Autokorelasi .....	60
4.12. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.13. <i>One Sample Kolmogorov –Smirnov Test ke 2</i> .....	62
4.14. Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
4.15. Hasil Uji Autokorelasi .....	64
4.16. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.17. Analisis Regresi Pertama .....	65

4.18.	Hasil Uji t.....	67
4.19.	Hasil Uji F (Dengan Signifiansi $\alpha = 5\%$ ) .....	68
4.20.	Hasil Uji Determinasi.....	69
4.21.	Analisis Regresi Kedua.. .....	71
4.22.	Hasil Uji t.....	72
4.23.	Hasil Uji F (Dengan Signifiansi $\alpha = 5\%$ ) .....	73
4.24.	Hasil Uji Determinasi.....	74



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran .....	30
4.1. Peta Lokasi SKPD & UPTD di Kab. Kudus.....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakatnya (Arif, 2008).

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Terdapat 3 mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga



mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah ( Mardiasmo, 2006 ).

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Pihak – pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito dkk, 2008).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Dita, 2011).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
  - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.
2. Andal , yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, ketepatanwaktuan dan keterandalan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan



mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatanwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005 dalam Desi dan Ertambang, 2008).

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Desi dan Ertambang, 2008). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi (2007) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat dirasakan. Pemerintah kota Palembang merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada penerimaan teknologi informasi, karena pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantu kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan

penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* tetapi pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Wahana Komputer, 2003).

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah

daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhany (2010) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tidak konsisten tersebut dikarenakan perbedaan responden yang digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas, telah ada beberapa satuan kerja yang sudah memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualitas, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan



akuntansi yang sudah memiliki uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang terspesifikasi dengan jelas.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan khususnya di Kabupaten Kudus memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008) dengan menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama tetapi dengan responden dan lokasi yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada dan dapat digeneralisasikan.

Dengan pertimbangan bahwa penelitian Desi dan Ertambang (2008) telah secara spesifik meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ada kemungkinan pengaruh ini juga terjadi dalam penerapan pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Kudus. Alasan lain Kabupaten Kudus dipilih sebagai objek penelitian karena Kabupaten Kudus ini telah menerapkan otonomi daerah dan Kabupaten ini telah menyelenggarakan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah

khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Berdasar uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul ” **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus )**”.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat telah disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi keuangan yang mencakup keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis, penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah kabupaten Kudus.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kapasitas

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.
3. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai

prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Faristina, 2011).

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler dalam Septiani, (2005) dalam Faristina, (2011), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005 dalam Faristiana, 2011).

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Faristina, 2011).

### 2.1.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo	2008	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi

			pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)	informasi, dan kapasitas SDM. memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Dhany Apriansyah	2010	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Bengkulu)	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati	2010	Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)	SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif.



## 2.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam Desi dan Ertambang (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Desi dan Ertambang, 2008 ). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk memvalidasi alat pemilihan, mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi, dan menentukan kebutuhan akan pelatihan (Griffin, 2004).

### **2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus diutuhkan. Seagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Celviana dan Rahmawati, 2010).

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003:5) yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan

teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial
2. *Affect* (perasaan individu)
3. Kesesuaian tugas
4. Konsekuensi jangka panjang
5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Kompleksitas

#### **2.4. Pengendalian Intern Akuntansi**

Pengawasan Intern di lingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor *private*. Karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran. Menurut SE/14/M.PAN/10/2006 dalam Dedi (2009), dalam sektor publik pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan terhadap bawahan memiliki delapan unsur untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi : pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan *review intern*.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003) : (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal. Mahmudi (2007) menyebutkan

komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut :

a. Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b. Otorisasi.

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan



formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas.

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

## **2.5. Nilai Informasi**

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005 dalam Desi dan Ertambang, 2008). Beberapa definisi dan rumusan kualitas informasi disajikan dalam tabel 2.2:

**Tabel 2.2 Definisi dan Rumusan Kualitas Informasi**

FASB (Suwardjono, 2005)	Wilkinson et.al., (2000)	PP No. 24 Tahun 2005
<p>Kriteria kebermanfaatan/kualitas informasi:</p> <p>1. Kualitas primer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberpautan/relevansi <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Nilai balikan</li> <li>✓Nilai prediktif</li> <li>✓Ketepatanwaktuan</li> </ul> </li> <li>- Keterandalan/reliabilitas <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Keterujian</li> <li>✓Ketepatan penyimbolan</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Kualitas sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbandingan</li> <li>- Konsistensi</li> <li>- Kenetralan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Informasi = Manfaat – Kos</li> <li>• Informasi bernilai jika dapat mengurangi ketidakpastian pengguna ketika berada dalam situasi keputusan tertentu.</li> <li>• Definisi kualitatif sulit diterapkan, karenanya perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif salah satunya <i>information economics approach</i>.</li> <li>• Nilai informasi dipengaruhi oleh kualitas informasi yang melekat pada informasi, yaitu: relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diquantifikasi, &amp; konsisten.</li> </ul>	<p>Karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.</p> <p>Ukuran-ukuran normatif tersebut:</p> <p>1. Relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Feedback value</i></li> <li>b. <i>Predictive value</i></li> <li>c. Tepat waktu</li> <li>d. Lengkap</li> </ul> <p>1. Andal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyajian jujur</li> <li>b. Dapat diverifikasi</li> <li>c. Netralitas</li> </ul> <p>2. Dapat dibandingkan</p> <p>3. Dapat dipahami</p>

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan dapat disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Utari dan Syaiful, 2008).

## 2.6. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/APBD, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah disajikan dalam tabel 2.3 (Desi dan Ertambang, 2008):

**Tabel 2.3 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

PP No. 24 Tahun 2005	Henley <i>et. al</i> (1992)	Jones & Pendlebury (1996)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Manajemen</li> <li>• Transparansi</li> <li>• Keseimbangan antar generasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan &amp; Pengelolaan</li> <li>• Akuntabilitas &amp; Pelaporan Retrospektif</li> <li>• Perencanaan &amp; Informasi Otorisasi</li> <li>• Kelangsungan organisasi</li> <li>• Hubungan masyarakat</li> <li>• Sumber fakta &amp; gambaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan &amp; memprediksi aliran kas, saldo neraca, &amp; kebutuhan sumber daya keuangan jangka pendek.</li> <li>• Memprediksi kondisi ekonomi.</li> <li>• Memonitor kinerja &amp; kesesuaian dengan peraturan.</li> <li>• Perencanaan &amp; penganggaran.</li> <li>• Mengevaluasi kinerja &amp; organisasional.</li> </ul>

## **2.7. Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah**

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005) dalam Desi dan Ertambang (2008).



Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah XYZ, Pemerintah Kota Palembang, atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan:

**H<sub>1a</sub>: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.**

Selain itu, rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian

tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan:

**H<sub>2a</sub>: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.**

### **2.7.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly *et al.*, (1994) dalam Desi dan Ertambang (2008) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

**H<sub>1b</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.**

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi yang bernama “pemerintah daerah”, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan

uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

**H<sub>2b</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.**

### **2.7.3 Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan uraian dan temuan empiris tersebut, penulis mengajukan hipotesis:

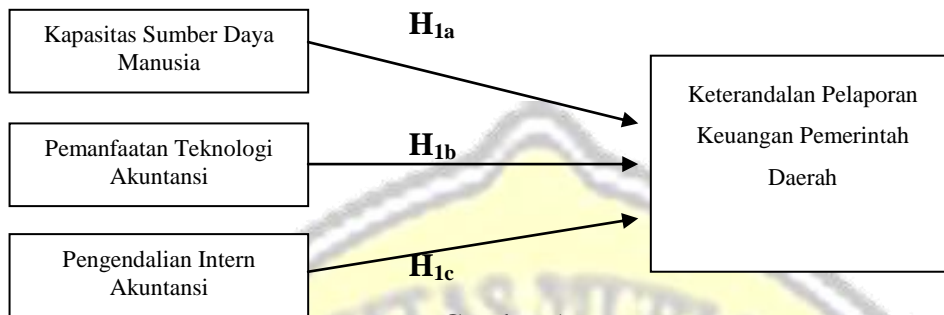
**H<sub>1c</sub>: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.**



## 2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 2.8.1 Kerangka Pemikiran

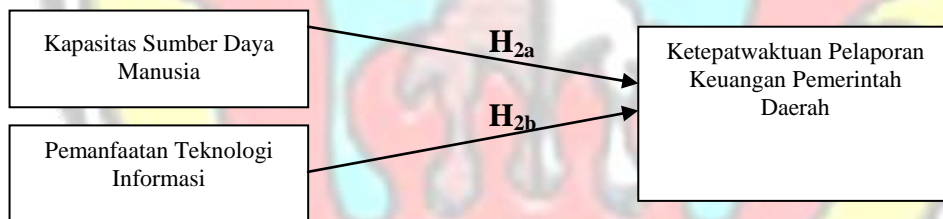
#### Model Pertama



Gambar 1a

Model Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### Model Kedua



Gambar 1b

Model Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Item Pertanyaan
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Urban(2001)).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Subbagian keuangan akuntansi anda memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.</li><li>2. Paling tidak 10 persen dari staf subbagian keuangan/akuntansi anda merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.</li><li>3. Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.</li><li>4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.</li><li>5. Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.</li><li>6. Terdapat pedoman mengenai prosedur</li></ol>

		<p>dan proses akuntansi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Subbagian keuangan/akuntansi anda telah melaksanakan proses akuntansi.</li> <li>8. Subbagian keuangan akuntansi anda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.</li> <li>9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.</li> <li>10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan</li> </ol>
2.Pemanfaatan Teknologi Informasi	<p>Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. (Jurnali &amp; Supomo(2002)).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian akuntansi/keuangan anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas</li> <li>2. Jaringan Internet telah terpasang di unit kerja anda.</li> <li>3. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan</li> <li>4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.</li> <li>5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.</li> <li>7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.</li> <li>8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.</li> <li>1. Subbagian keuangan/akuntansi anda menye-lenggarakan sistem akuntansi</li> </ol>
3.Pengendalian Intern	<p>Bagian dar pengendalian</p>	

Akuntansi	intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi.	<p>yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur akuntansi penerimaan kas</li> <li>Prosedur akuntansi pengeluaran kas</li> <li>Prosedur akuntansi aset</li> <li>Prosedur akuntansi selain kas</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar rekening (<i>chart of account</i>) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.</li> <li>Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang</li> <li>Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.</li> <li>Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.</li> <li>Catatan akuntansi dijaga untuk tetap "<i>up-to-date</i>".</li> <li>Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.</li> <li>Sistem akuntansi yang ada memungkinkan audit/<i>transaction trail</i>.</li> <li>Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.</li> </ol>
4. Nilai Informasi	Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (PP No. 24 Tahun 2005)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.</li> <li>Neraca disajikan.</li> <li>Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.</li> <li>Catatan atas laporan keuangan disajikan</li> <li>Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.</li> <li>Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.</li> <li>Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.</li> </ol>
- Keterandalan		
- Ketepatan	Tersedianya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi yang dibutuhkan segera</li> </ol>



waktuan	informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (PP No. 24 Tahun 2005)	tersedia ketika diminta. 2. Laporan-laporan sering disediakan secara sistematis dan teratur, misal : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu). 3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur : a. Laporan realisasi semester pertama b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD c. Neraca d. Catatan atas Laporan Keuangan.
---------	---	---

### 3.1.1 Variabel Independen

#### 3.1.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya (Dita, 2011)

### **3.1.1.2 Pemanfaatan TI**

Menurut Wilkinson *et al.* (2000) dalam Desi dan Ertambang (2008), teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Menurut Desi dan Ertambang (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

### **3.1.1.3 Pengendalian Intern Akuntansi**

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005 dalam Celviana dan Rahmawati, 2010).

### **3.1.2 Variabel Dependen**

#### **3.1.2.1 Nilai Informasi**

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) : Keterandalan dan Ketepatanwaktuan

Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Kudus. Penyampelan atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Desi dan Ertambang 2008). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagiann akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 3 orang yang menjadi responden.
- c. Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas SKPD.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penentuan responden dengan jumlah 102 untuk 34 SKPD dengan masing-masing tiap SKPD 3 responden didasarkan pada alasan :

- a. Maksimal 3 responden pada tiap SKPD supaya unit analisis bersifat heterogen dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di SKPD.
- b. Penentuan 3 responden pada tiap SKPD karena hanya akan melihat persepsi kepala bagian, bagian pencatatan/akuntansi dan pemegang kas.
- c. Penentuan 3 responden pada tiap SKPD didasarkan pada asumsi bahwa persepsi kepala bagian, bagian pencatatan/akuntansi dan pemegang kas



yang mengetahui secara pasti mengenai pelaporan keuangan pada tiap SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Meliputi :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
10. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
11. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. BAPPEDA
16. BKD
17. Bapermas, Perempuan dan KB
18. Inspektorat
19. Kantor Ketahanan Pangan
20. Kantor Kesbanglinmas

21. Kantor Perpustakaan dan Arsip
22. Kantor Lingkungan Hidup
23. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
24. Rumah Sakit Umum Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Kecamatan Bae
27. Kecamatan Dawe
28. Kecamatan Gebog
29. Kecamatan Jati
30. Kecamatan Jekulo
31. Kecamatan Kaliwungu
32. Kecamatan Kota
33. Kecamatan Mejobo
34. Kecamatan Undaan

### **3.3. Jenis dan Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lokasi penelitian terbatas di Kabupaten Kudus.

### **3.4. Metode Analisis Data**

#### **3.4.1. Uji Reabilitas**

Menurut Ghozali (2001), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

#### **3.4.2. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2001).

#### **3.4.3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian *multikolinieritas*, *heteroskedastisitas*, *autokorelasi*, dan *uji normalitas*.

##### **a. Multikolinieritas**

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara

variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji *Multikolinieritas* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika  $VIF > 10$  dan nilai *tolerance*  $< 0,10$  maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2001).

**b. *Heteroskedastisitas***

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*, tidak *heteroskedastisitas*.

*Heteroskedastisitas* ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi *heteroskedastisitas*. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Selain itu, *heteroskedastisitas* dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi *heteroskedastisitas* dalam model regresi (Ghozali, 2001).



### c. *Autokorelasi*

*Autokorelasi* dikenal dengan nilai **Durbin Watson (D-W)** artinya terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode sebelumnya (Ghozali, 2001). Dalam model regresi diharapkan tidak terjadi problem *autokorelasi*. Nilai *Durbin-Watson (D-W)* diukur dengan :

- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- Bila nilai DW terletak diantara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### d. *Uji Normalitas*

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang bersangkutan.

- a. Bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.
- b. Bila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normaliditas

Untuk memeriksa model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat diperiksa melalui gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*.

### 3.5. Analisis Deskriptif

#### 3.5.1 Uji Regresi

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linear berganda (*moderated regression analysis*).

$$KA = a + b_1KSDM + b_2PTI + b_3PIA + e \dots\dots\dots(1)$$

$$KW = a + b_1KSDM + b_2PTI + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

KA : Keterandalan Laporan Keuangan

KW : Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

a : Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub> : Koefisien regresi

KSDM : Kapasitas Sumber Daya Manusia

PTI : Pemanfaatan Teknologi Infomasi

PIA : Pengendalian Intern Akuntansi

e : *error*

### 3.5.2 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001).

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap  $t$  hitung, kemudian membandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila  $t$  hitung  $> t$  tabel dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $t$  hitung  $< t$  tabel dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0$  akan diterima ( $H_i$  ditolak) pada tingkat kepercayaan tertentu jika  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ . Dengan demikian variabel bebas ke- $i$  yang diuji tidak mempengaruhi variabel tidak bebas. Dengan kata lain variabel bebas ke- $i$  tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya  $H_0$  akan ditolak ( $H_i$  diterima) pada tingkat kepercayaan tertentu jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  sehingga variabel bebas ke- $i$  yang diuji mempengaruhi variabel tidak bebas.

Dengan kata lain variabel bebas ke-i signifikan. Secara statistik nilai  $t_{hitung}$  dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$t_{hit} = \frac{\beta_i}{Se\beta_i}$$

Sedang untuk  $t_{tabel} = t_{\alpha/2; df = N - k}$

Keterangan :

$\beta_i$  = koefisien regresi

$Se$  = *standart error*

$\alpha$  = tingkat signifikansi

$df$  = *degree of freedom*

$k$  = jumlah parameter

$N$  = jumlah sampel

### 3.5.3 Uji F

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yaitu dengan Uji F (Uji Simultan).

a. Menentukan formulasi hipotesis

$H_0 : b_1 = 0$  artinya, semua variabel bebas (X) secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat (Y)

$H_a : b_1 > 0$  artinya, semua variabel bebas (X) secara simultan mempengaruhi variabel terikat (Y)

b. Menentukan derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ )

c. Menentukan signifikansi

Nilai signifikansi ( $P \text{ value}$ )  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.



Nilai signifikansi (*P value*) > 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Kriteria pengujian

$H_0$  diterima bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$

$H_0$  ditolak bila  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

$H_0$  akan diterima ( $H_i$  ditolak) pada tingkat kepercayaan tertentu jika  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel-variabel bebas yang diuji tidak mempengaruhi variabel tidak bebas. Dengan kata lain variabel-variabel bebas tidak signifikan secara statistik.  $H_0$  akan ditolak ( $H_i$  diterima) pada tingkat kepercayaan tertentu jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  sehingga variabel bebas ke- $i$  yang diuji mempengaruhi variabel tidak bebas. Dengan demikian variabel-variabel bebas yang diuji mempengaruhi variabel tidak bebas sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut signifikan secara statistik.

Nilai  $F_{hitung}$  dapat dicari dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(N - k)}$$

Keterangan :

$R^2$  = koefisien determinasi

$k$  = jumlah variabel bebas yang digunakan

$N$  = jumlah sampel.

#### 3.5.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi /  $R^2$  digunakan untuk mengetahui hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika  $R^2$  semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R Square*, hal ini dikarenakan jumlah variabel independen lebih dari dua (Ghozali, 2001).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek

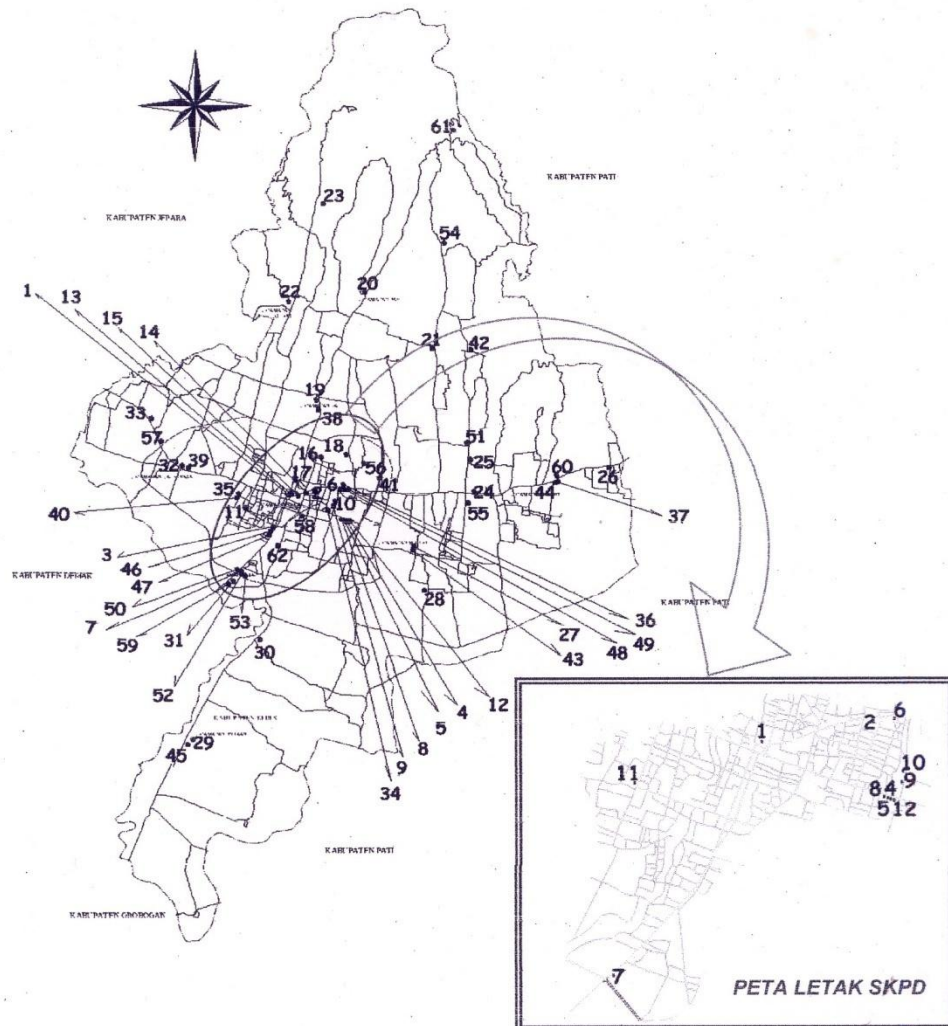
Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kudus, berada di jalur pantai utara timur Jawa Tengah, yaitu di antara (Semarang-Surabaya) berada 51 km sebelah timur Kota Semarang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Selain itu kudus juga di kenal sebagai kota santri, kota ini juga menjadi pusat perkembangan agama islam pada abad pertengahan hal itu dapat dilihat dari terdapatnya 3 makam wali/ sunan, yaitu Sunan Kudus , Sunan Muria dan Sunan Kedu.

Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang dibagi lagi atas 123 desa dan 9 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kudus. Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil dan memiliki jumlah kecamatan paling sedikit di Jawa Tengah.

Obyek dalam penelitian ini meliputi kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan jumlah responden sebanyak 102.

**Gambar 4.1**

**Peta Lokasi SKPD & UPTD di Kab. Kudus**



**Keterangan Gambar :**

- |                                 |  |                            |                          |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. Kompleks Kabupaten           | 11. Dinas Perhubungan                      | 21. UPTD SMP 2 Dawe        | 31. UPTD SMP 1 Jati      |
| 2. Kantor Pengelola Pasar       | 12. Dinas Pariwisata & Keb.                | 22. UPTD SMP 1 Gebog       | 32. UPTD SMP 1 Kalwano   |
| 3. Rumah Sakit Daerah           | 13. UPTD SMP 1 Kudus                       | 23. UPTD SMP 2 Gebog       | 33. UPTD SMP 2 Kalwano   |
| 4. Dinas Pendidikan             | 14. UPTD SMP 2 Kudus                       | 24. UPTD SMP 1 Jeluku      | 34. UPTD SMA 1 Kudus     |
| 5. Dinas Kesehatan              | 15. UPTD SMP 3 Kudus                       | 25. UPTD SMP 2 Jeluku      | 35. UPTD SMA 2 Kudus     |
| 6. Dinas Pekerjaan Umum         | 16. UPTD SMP 4 Kudus                       | 26. UPTD SMP 3 Jeluku      | 36. UPTD SMA 1 Bae       |
| 7. Dinas LHPE                   | 17. UPTD SMP 5 Kudus                       | 27. UPTD SMP 1 Majoba      | 37. UPTD SMA 1 Jeluku    |
| 8. Dinas Pertanian              | 18. UPTD SMP 1 Bae                         | 28. UPTD SMP 2 Majoba      | 38. UPTD SMA 1 Dawe      |
| 9. Dinas Kertrans               | 19. UPTD SMP 2 Bae                         | 29. UPTD SMP 1 Undaan      | 39. UPTD SMA 1 Kalwano   |
| 10. Dinas Indakop               | 20. UPTD SMP 1 Dawe                        | 30. UPTD SMP 2 Undaan      | 40. UPTD MAN 1 Purwasari |
| 41. UPTD MAN 2 Gongg            | 51. UPTD TPA & IPLT Tanjung Raja           | 61. UPTD Pesanggrahan Colo |                          |
| 42. UPTD SMK Industri Rajesari  | 52. UPTD Kebersihan                        | 62. UPTD Museum Kretek     |                          |
| 43. UPTD Puskesmas Majoba       | 53. UPTD Pertanian                         |                            |                          |
| 44. UPTD Puskesmas Jeluku       | 54. UPTD Balai Benih Tanaman               |                            |                          |
| 45. UPTD Puskesmas Undaan       | 55. UPTD Reproduksi Ternak                 |                            |                          |
| 46. UPTD Gudang Farmasi         | 56. UPTD Rumah Potong Hewan & Timb. Ternak |                            |                          |
| 47. UPTD Laboratorium Kesehatan | 57. UPTD Ketahanan Pangan                  |                            |                          |
| 48. UPTD Pemadam Kebakaran      | 58. UPTD Balai Latihan Kerja               |                            |                          |
| 49. UPTD Pembongkolan           | 59. UPTD Terminal Bus                      |                            |                          |
| 50. UPTD Pool Alat Berat        | 60. UPTD Perparkiran                       |                            |                          |



## 4.2 Deskripsi Responden

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 102 kuesioner yang diantar langsung ke 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dengan responden sebanyak 102. Pengiriman kuesioner dilakukan pada tanggal 23 Juli 2012. Setelah 2 minggu kuesioner yang kembali hanya diperoleh 76 lembar kuesioner.

Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*).

**Tabel 4.1**  
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	102
Kuesioner yang kembali	76
Kuesioner yang dapat digunakan	76
Kuesioner yang tidak kembali (102-76)	26
Tingkat pengembalian kuesioner ( $76/102 \times 100\%$ )	75%
Tingkat pengembalian yang digunakan ( $76/102 \times 100\%$ )	75%

Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung dengan batas pengambilan 2 minggu setelah pembagian kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 76 dimana semuanya dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dan dapat digunakan (*response*) sebesar 75%, dihitung dari prosentase jumlah kuesioner yang kembali (76 kuesioner) dibagi total yang dikirim (102 kuesioner).

Gambaran tentang profil responden dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.2 di bawah ini. Profil responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan waktu lama bekerja.

#### 4.2.1 Jenis Kelamin

Data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	41	54%
2	Wanita	35	46%
	Total	76	100 %

Sumber data : Hasil jawaban responden yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin Laki-laki sebesar 54 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Kudus adalah berjenis kelamin Laki-laki.

#### 4.2.2 Umur Responden

Data responden berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.3**

Gambaran Usia Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
20 – 30 tahun	12	16 %
30 – 40 tahun	25	33 %
40 – 50 tahun	29	38 %
> 50 tahun	10	13 %
Total	76	100%

Sumber data : Hasil jawaban responden yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar usia responden 40-50 tahun. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 38%.

#### 4.2.3 Latar Belakang Pendidikan

Data responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**

Gambaran Latar Belakang Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMU	18	24 %
Diploma	19	25 %
S1	33	43 %
S2	6	8 %
Total	76	100%

Sumber data : Hasil jawaban responden yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar berpendidikan S1. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 43 %.

#### 4.2.4 Lama Bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah

Data responden berdasarkan lama bekerja pada satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**

Gambaran Lama Bekerja

Pengalaman Kerja	Frekuensi	Persentase
< 5 tahun	31	41 %
5 – 10 tahun	13	17 %
11 – 15 tahun	9	12 %
16 – 20 tahun	11	14 %
> 20 tahun	12	16 %
Total	76	100%

Sumber data : Hasil jawaban responden yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar dalam bekerja di satuan kerja perangkat daerah yaitu kurang dari 5 tahun. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 41 %.

### 4.3 Deskriptif Data

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Deskriptif Statistik**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kapasitas SDM	76	30	50	39,947	3,713
Pemanfaatan TI	76	22	40	31,842	4,135
Pengendalian Intern Akuntansi	76	20	45	36,947	5,593
Keterandalan Pelaporan Keuangan	76	17	35	28,184	4,091
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan	76	9	15	11,789	1,660

Sumber : data pimer yang diolah (*Output SPSS*)

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 76 data. Variabel kapasitas SDM mempunyai nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata-rata kapasitas SDM adalah sebesar 39,947 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,713. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kapasitas sumber daya manusia pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kudus tidak jauh berbeda antar satuan kerja perangkat daerah.



Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai minimum 22 dan nilai maksimum 40. Rata-rata pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 31,842. Nilai standar deviasi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 4,135. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kudus dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak jauh berbeda.

Variabel pengendalian intern akuntansi mempunyai nilai minimum 20 dan nilai maksimum 45. Rata-rata pengendalian intern akuntansi adalah sebesar 36,947. Nilai standar deviasi pengendalian intern akuntansi adalah sebesar 5,593. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa pengendalian intern akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kudus tidak jauh berbeda.

Variabel keterandalan pelaporan keuangan mempunyai nilai minimum 17 dan nilai maksimum 35. Rata-rata keterandalan pelaporan keuangan adalah sebesar 28,184. Nilai standar deviasi keterandalan laporan keuangan adalah sebesar 4,091. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa dalam keterandalan pelaporan keuangan antara satuan kerja perangkat daerah Kudus dengan satuan kerja lainnya di Kabupaten Kudus adalah tidak berbeda jauh.

Variabel ketepatanwaktuan pelaporan keuangan mempunyai nilai minimum 9 dan nilai maksimum 15. Rata-rata ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah 11,789. Nilai standar deviasi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah 1,660.

Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kudus dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan antara satuan kerja perangkat daerah tidak berbeda jauh.

#### 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

##### 4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
KS1	0,403	0,226	Valid
KS2	0,458	0,226	Valid
KS3	0,666	0,226	Valid
KS4	0,473	0,226	Valid
KS5	0,686	0,226	Valid
KS6	0,616	0,226	Valid
KS7	0,659	0,226	Valid
KS8	0,585	0,226	Valid
KS9	0,593	0,226	Valid
KS10	0,517	0,226	Valid
PTI1	0,668	0,226	Valid
PTI2	0,608	0,226	Valid
PTI3	0,762	0,226	Valid
PTI4	0,754	0,226	Valid
PTI5	0,606	0,226	Valid
PTI6	0,661	0,226	Valid
PTI7	0,717	0,226	Valid
PTI8	0,666	0,226	Valid

PIA1	0,600	0,226	Valid
PIA2	0,793	0,226	Valid
PIA3	0,905	0,226	Valid
PIA4	0,910	0,226	Valid
PIA5	0,889	0,226	Valid
PIA6	0,908	0,226	Valid
PIA7	0,821	0,226	Valid
PIA8	0,611	0,226	Valid
PIA9	0,823	0,226	Valid
KA1	0,818	0,226	Valid
KA2	0,793	0,226	Valid
KA3	0,741	0,226	Valid
KA4	0,710	0,226	Valid
KA5	0,774	0,226	Valid
KA6	0,762	0,226	Valid
KA7	0,748	0,226	Valid
KW1	0,820	0,226	Valid
KW2	0,827	0,226	Valid
KW3	0,820	0,226	Valid

Keterangan : Tabel (dk = 76;  $\alpha$  = 2-tailed) = 0,226

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner memiliki r hitung lebih dari r table ( $r$  hitung > 0,226), yang berarti masing-masing item dari variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan pelaporan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan pelaporan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan memberikan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
Hasil Uji Reliabilitas

Kuesioner	AlphaCronbach	Nilai kritis	Keterangan
Kualitas SDM	0,767	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,834	0,6	Reliabel
Pengendalian Intern Akuntansi	0,932	0,6	Reliabel
Keterandalan Pelaporan Keuangan	0,881	0,6	Reliabel
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan	0,751	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan pelaporan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan memiliki nilai cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,6, maka dikatakan reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Asumsi Klasik Regresi Pertama

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi



normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas menggunakan bantuan program SPSS :

**Tabel 4.9**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,68706598
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,064
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		,760
Asymp. Sig. (2-tailed)		,610

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

Hasil pengujian normalitas data dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,610 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2006). Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Multikolinearitas terjadi apabila antar variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan. Jadi Nilai

*tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan kolinieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas (Lampiran):

**Tabel 4.10**

**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kualitas SDM	0,712	1,404
	Pemanfaatan TI	0,330	3,027
	Pengendalian Intern Akuntansi	0,393	2,544

Sumber : Data primer yang diolah, Output SPSS.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai  $VIF < 10$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2006). Berikut merupakan hasil pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi

untuk penelitian ini menggunakan *Durbin Watson test*, dimana dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai durbin watson lebih besar dari  $du$  dan lebih kecil dari  $4-du$  ( $du < dw < 4-du$ ). Dari hasil pengolahan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11**

Hasil Autokorelasi

DI	dw	du	Keterangan
1,546	1,537	1,710	Ada autokorelasi positif

Sumber: Data primer yang diolah 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai DW sebesar 1,537. Nilai ini lebih besar dari nilai 0 dan lebih kecil dari nilai  $du$  ( $0 < 1,537 < 1,546$ ), sehingga dapat disimpulkan ada autokorelasi positif. Dikarenakan penelitian ini bukan penelitian time series, maka uji autokorelasi dapat diabaikan.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Dengan asumsi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel dependent (*absolute*) maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.

Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,245	2,584		-,482	,631
Kualitas SDM	,099	,066	,204	1,500	,138
Pemanfaatan TI	,022	,087	,050	,250	,803
Pengendalian Intern Akuntansi	-,039	,059	-,120	-,656	,514

a. Dependent Variable: Abs1

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependent nilai absolute. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya (sig) di atas 0,05 (sig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.5.2 Uji Asumsi Klasik Regresi 2

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas menggunakan bantuan program SPSS :



**Tabel 4.13**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,21088116
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,040
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,665
Asymp. Sig. (2-tailed)		,768

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

Hasil pengujian normalitas data dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,768 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2006). Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. Multikolinearitas terjadi apabila antar variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan. Jadi Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan kolinieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar

variabel bebas (independen). Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas :

**Tabel 4.14**

**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas SDM	0,838	1,193
Pemanfaatan TI	0,838	1,193

Sumber : Data primer yang diolah, Output SPSS.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukan semua variabel bebas memiliki nilai  $VIF < 10$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji *apakah* dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2006). Berikut merupakan hasil pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi untuk penelitian ini menggunakan *Durbin Watson test*, dimana dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai *durbin watson* lebih besar dari  $du$  dan lebih kecil dari  $4-du$  ( $du < dw < 4-du$ ). Dari hasil pengolahan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.15**

Hasil Autokorelasi

dl	dw	du	Keterangan
1,574	1,773	1,681	Bebas autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai DW sebesar 1,773. Nilai ini lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari nilai 4-du ( $1,681 < 1,773 < 4-1,681$ ), sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Dikarenakan penelitian ini bukan penelitian time series, maka uji autokorelasi dapat diabaikan.

#### **4. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Dengan asumsi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependent (*absolute*) maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.

Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.16**

Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,291	0,940		1,374	0,174
	Kualitas SDM	-0,017	0,024	-0,087	-0,682	0,497
	Pemanfaatan TI	0,011	0,022	0,064	0,501	0,618

a. Dependent Variable: Abs2

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependent nilai absolute. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya (sig) di atas 0,05 ( $\text{sig} > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## 4.6 Analisis Regresi

### 4.6.1 Analisis Regresi Pertama

Analisis regresi pertama dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.17**

### Analisis Regresi Berganda Pertama

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,919	3,953		0,739	0,463
	Kapasitas SDM	0,066	0,101	0,060	0,653	0,516
	Pemanfaatan TI	0,279	0,133	0,282	2,094	0,040
	Pengendalian Intern Akuntansi	0,372	0,090	0,508	4,118	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, Output SPSS.



Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y1 = 2,919 + 0,066 X1 + 0,279 X2 + 0,372 X3 + e$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 2,919 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel keterandalan pelaporan keuangan (Y1) pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kudus adalah 2,919
2. Koefisien regresi variabel kualitas SDM 0,066 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan kualitas SDM akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0.066 atau sebesar 6,6 % tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi pemanfaatan TI 0,279 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pemanfaatan TI akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0.279 atau sebesar 27,9 % tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4. Koefisien regresi pengendalian intern bernilai 0,372 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengendalian intern akuntansi akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0.372 atau sebesar 37,2 % tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

#### 4.6.1.1 Uji Kelayakan Model

##### 1. Uji t (Regresi Parsial)

Selanjutnya untuk menyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu : kapasitas SDM, pemanfaatan TI, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan pengujian secara parsial. Dari perhitungan komputer yang disajikan dalam lampiran dan tabel 4.18 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebagai berikut ini.

Tabel 4.18

**Hasil Analisis Parsial**  
(Dengan Signifikansi  $\alpha = 5\%$  )

Variabel	$t_{hitung} : t_{tabel}$		Prob. Sig		Ket
	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	$\alpha = 5\%$	
Kapasitas SDM	0,653	1,666	0,516	0,05	Tdk
Pemanfaatan TI	2,094	1,666	0,040	0,05	Sig
Pengendalian Intern	4,118	1,666	0,000	0,05	Sig

Sumber : Ringkasan output estimasi.

##### 2. Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan dengan *analysis of variance*. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan menggunakan

uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y1 secara bersama-sama.

**Tabel 4.19**

**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	713,897	3	237,966	31,639	0,000
	Residual	541,524	72	7,521		
	Total	1255,421	75			

Sumber : Data primer yang diolah, Output SPSS.

Berdasarkan tabel 4.19 tampak bahwa nilai F hitung sebesar 31,639 lebih besar dari F tabel sebesar 2,73 dengan angka signifikansi =  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

### **3. Koefisien Determinasi**

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai  $R^2$  sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.20**

**Hasil Uji Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,754	0,569	0,551	2,742

Sumber : Data primer yang diolah, Output SPSS.

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,551, yang mengandung arti bahwa 55,1% variasi besarnya keterandalan pelaporan keuangan bisa dijelaskan oleh variasi kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan pengendalian internal akuntansi. Sedangkan sisanya 44,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**4.6.1.2 Pengujian Hipotesis**

Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka digunakan uji parsial (menguji individual variabel bebas terhadap variabel terikat).

**1. Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai koefisien regresi kualitas SDM sebesar 0,066. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi kualitas SDM adalah  $0,516 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap



keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama a ( $H_{1a}$ ) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah **ditolak**.

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,279, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi adalah  $0,040 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis satu b ( $H_{1b}$ ) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

## **3. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai koefisien regresi pengendalian intern akuntansi 0,372, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pengendalian intern akuntansi adalah  $0,000 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa

pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis satu c ( $H_{1c}$ ) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah **diterima**

#### 4.6.2 Analisis Regresi Kedua

Analisis regresi kedua dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan menggunakan bantuan program SPSS didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.21**

#### **Analisis Regresi Berganda Kedua**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,519	1,618		0,321	0,749
Kapasitas SDM	0,104	0,042	0,233	2,499	0,015
Pemanfaatan TI	0,223	0,037	0,556	5,961	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, Output SPSS.

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,519 + 0,104 X_1 + 0,223 X_2 + e$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 0,519 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan (Y2) pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kudus adalah 0,519.

2. Koefisien regresi variabel kapasitas SDM 0,104 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan kualitas SDM akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0.104 atau sebesar 10,4 % tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi pemanfaatan TI 0,223 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pemanfaatan TI akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan sebesar 0.223 atau sebesar 23,3 % tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

#### **4.6.2.1 Uji Kelayakan Model**

##### **1. Uji t (Regresi Parsial)**

Selanjutnya untuk menyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu : kapasitas SDM dan pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan pengujian secara parsial. Dari perhitungan komputer yang disajikan dalam lampiran dan tabel 4.18 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebagai berikut ini.

Tabel 4.22

**Hasil Analisis Parsial**  
(Dengan Signifikansi  $\alpha = 5\%$  )

Variabel	$t_{hitung} : t_{tabel}$		Prob. Sig		Ket
	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	$\alpha = 5\%$	
Kapasitas SDM	2,499	1,666	0,015	0,05	Sig
Pemanfaatan TI	5,961	1,666	0,000	0,05	Sig

Sumber : Ringkasan output estimasi.

## 2. Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan dengan *analysis of variance*. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2 secara bersama-sama.

Dengan menggunakan bantuan program SPSS didapatkan hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 4.23

### Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96,664	2	48,332	32,084	0,000
Residual	109,967	73	1,506		
Total	206,632	75			

Sumber : Data Sekunder Diolah, Output SPSS.



Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai F hitung sebesar 32,084 lebih besar dari F tabel sebesar 3,12 dengan angka signifikansi  $= 0,000 < \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara kapasitas SDM, dan pemanfaatan TI terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

### 3. Uji Determinasi

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai  $R^2$  sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 4.24**

#### **Hasil Uji Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,684	0,468	0,453	1,227

Sumber : Data Sekunder Diolah, Output SPSS.

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,453, yang mengandung arti bahwa 45,3% variasi besarnya *ketepatanwaktuan pelaporan keuangan* bisa dijelaskan oleh variasi kapasitas SDM, dan

pemanfaatan TI. Sedangkan sisanya 54,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### **4.6.2.2 Pengujian Hipotesis**

Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka digunakan uji parsial (menguji individual variabel bebas terhadap variabel terikat).

##### **1. Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh nilai koefisien regresi kapasitas SDM sebesar 0,104. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi kapasitas SDM adalah  $0,015 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua a (H2a) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

##### **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,223, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan

teknologi informasi adalah  $0,000 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis dua b (H2b) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

#### **4.7 Pembahasan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama H1a didapatkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Faristina (2011) dan Dita (2011) yang menghasilkan kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka

pegawai yang ada yang diberdayakan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Celviana dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis H1b dan H2b didapatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Faristina (2011), Celviana dan Rahmawati (2010) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Dita (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan TI tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan



data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga H1c didapatkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Dita (2011), dan Faristina (2011) yang menghasilkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga H2a Bahwa kapasitas SDM berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2010), dan Dita (2011) yang menghasilkan kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Logis dari temuan ini adalah ketika seseorang memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka ia akan menyelesaikan pekerjaan/tugasnya dengan baik dan lebih cepat. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Celviana dan Rahmawati (2010), Dhany Apriansyah (2010), dan Faristina (2011) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuaan pelaporan keuangan pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Faristina (2011) dan Dita (2011). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan kurang dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Celviana dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini sejalan dengan Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010) , Faristina (2011), Celviana dan Rahmawati (2010). Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan

transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

3. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Dita (2011), dan Faristina (2011). Kegiatan pengendalian ini tentunya menjamin semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan keterandalan suatu laporan keuangan akan tercapai.
4. Kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Desi dan Ertambang (2010), dan Dita (2011). Logika dari temuan ini adalah ketika seorang pegawai memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian, pada sisi lain seorang pegawai memiliki pemahaman yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya akan menyelesaikan pekerjaan/tugasnya dengan baik dan lebih cepat.
5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Desi dan Ertambang (2008),

Dhany (2010) , Faristina (2011), Celviana dan Rahmawati (2010). Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya yaitu ketepatanwaktuan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Dita (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan TI tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

## **5.2 Keterbatasan**

1. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2 proksi saja yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan.
3. Perbedaan signifikansi yang cukup tinggi antara pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Boleh jadi temuan ini memberikan dukungan mengenai saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan untuk mendapatkan kebermanfaatan. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan



mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan.

### 5.3 Saran

1. Melengkapi metoda survai dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Menambah proksi variabel dependen lain yang terkait dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah seperti dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Penelitian selanjutnya dapat juga meneliti mengenai hubungan keterandalan dan ketepatanwaktuan karena antara keterandalan dan ketepatanwaktuan sendiri sering kali terjadi *trade-off*. Hal ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Santiadji, dkk (2010).

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Tinjauan Pustaka. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

Arip\_A\_P. 2008 . *Pemikiran Dasar dan Penyamaan Persepsi*. (Diakses tanggal 28 Desember 2011) [[www.google.com](http://www.google.com)]

Astuti Handayani Siregar, I Ketut Suryanawa. 2009. *Pemanfaatan TI dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol. 4, No. 2 Juli 2009.

Celviana Widyaningrum, Rahmawati. 2010. *Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten*. *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*.

Dedi Kusmayadi. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan keuangan Daerah terhadap Good Government , Suervei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya*. *Junal Ichsan Gorontalo*. Vol. 4. No. 2 Edisi Mei – Juli 2009.

Dedi Rianto Rahardi. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Sektor Publik*. *Seminar Nasional teknologi 2007*.

Desi Indriasari, Ertambang Nahartyo. 2009. *Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Akuntansi*.

Dita Arfianti. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.

Faristina Rosalin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta : BPFE.

<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Imam Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Imam Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1.

Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ricky Griffin. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Gramedia.

Santiadji Mustafa, Sutrisno, Rosid.2010. *Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi.*

Utari Hilmi, Syaiful Ali. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2009*. *Jurnal Akuntansi.*

Warsito Kawedar, Abdul Rohman, Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.





## Lampiran Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas SDM	76	30	50	39,95	3,713
Pemanfaatan TI	76	22	40	31,84	4,135
Pengendalian Intern Akuntansi	76	20	45	36,95	5,593
Keterandalan Pelaporan Keuangan	76	17	35	28,18	4,091
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan	76	9	15	11,79	1,660
Valid N (listwise)	76				



## Lampiran

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X1

#### Correlations

	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	KS7	KS8	KS9	KS10	Total
KS1 Pearson Correlation	1	,169	,304(**)	,162	,258(*)	,052	,217	,200	,120	,064	,403(**)
Sig. (2-tailed)	.	,143	,008	,163	,025	,657	,060	,082	,304	,583	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS2 Pearson Correlation	,169	1	,411(**)	,200	,173	,266(*)	,286(*)	,161	,051	-,051	,458(**)
Sig. (2-tailed)	,143	.	,000	,083	,136	,020	,012	,164	,660	,661	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS3 Pearson Correlation	,304(**)	,411(**)	1	,262(*)	,378(**)	,208	,319(**)	,389(**)	,322(**)	,257(*)	,666(**)
Sig. (2-tailed)	,008	,000	.	,022	,001	,072	,005	,001	,005	,025	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS4 Pearson Correlation	,162	,200	,262(*)	1	,308(**)	,255(*)	,255(*)	,083	,195	,013	,473(**)
Sig. (2-tailed)	,163	,083	,022	.	,007	,026	,026	,477	,092	,912	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS5 Pearson Correlation	,258(*)	,173	,378(**)	,308(**)	1	,418(**)	,374(**)	,298(**)	,441(**)	,186	,686(**)
Sig. (2-tailed)	,025	,136	,001	,007	.	,000	,001	,009	,000	,107	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS6 Pearson Correlation	,052	,266(*)	,208	,255(*)	,418(**)	1	,338(**)	,247(*)	,305(**)	,329(**)	,616(**)
Sig. (2-tailed)	,657	,020	,072	,026	,000	.	,003	,031	,007	,004	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS7 Pearson Correlation	,217	,286(*)	,319(**)	,255(*)	,374(**)	,338(**)	1	,390(**)	,169	,317(**)	,659(**)
Sig. (2-tailed)	,060	,012	,005	,026	,001	,003	.	,001	,144	,005	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS8 Pearson Correlation	,200	,161	,389(**)	,083	,298(**)	,247(*)	,390(**)	1	,280(*)	,265(*)	,585(**)
Sig. (2-tailed)	,082	,164	,001	,477	,009	,031	,001	.	,014	,021	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS9 Pearson Correlation	,120	,051	,322(**)	,195	,441(**)	,305(**)	,169	,280(*)	1	,410(**)	,593(**)
Sig. (2-tailed)	,304	,660	,005	,092	,000	,007	,144	,014	.	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
KS10 Pearson Correlation	,064	-,051	,257(*)	,013	,186	,329(**)	,317(**)	,265(*)	,410(**)	1	,517(**)
Sig. (2-tailed)	,583	,661	,025	,912	,107	,004	,005	,021	,000	.	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Total Pearson Correlation	,403(**)	,458(**)	,666(**)	,473(**)	,686(**)	,616(**)	,659(**)	,585(**)	,593(**)	,517(**)	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	.
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliability

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	76	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,767	,765	10

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KS1	4,09	,467	76
KS2	4,17	,641	76
KS3	4,08	,606	76
KS4	3,92	,627	76
KS5	3,92	,726	76
KS6	3,97	,653	76
KS7	3,93	,718	76
KS8	3,92	,648	76
KS9	4,03	,673	76
KS10	3,91	,734	76

### Inter-Item Correlation Matrix

	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	KS7	KS8	KS9	KS10
KS1	1,000	,169	,304	,162	,258	,052	,217	,200	,120	,064
KS2	,169	1,000	,411	,200	,173	,266	,286	,161	,051	-,051
KS3	,304	,411	1,000	,262	,378	,208	,319	,389	,322	,257
KS4	,162	,200	,262	1,000	,308	,255	,255	,083	,195	,013
KS5	,258	,173	,378	,308	1,000	,418	,374	,298	,441	,186
KS6	,052	,266	,208	,255	,418	1,000	,338	,247	,305	,329
KS7	,217	,286	,319	,255	,374	,338	1,000	,390	,169	,317
KS8	,200	,161	,389	,083	,298	,247	,390	1,000	,280	,265
KS9	,120	,051	,322	,195	,441	,305	,169	,280	1,000	,410
KS10	,064	-,051	,257	,013	,186	,329	,317	,265	,410	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

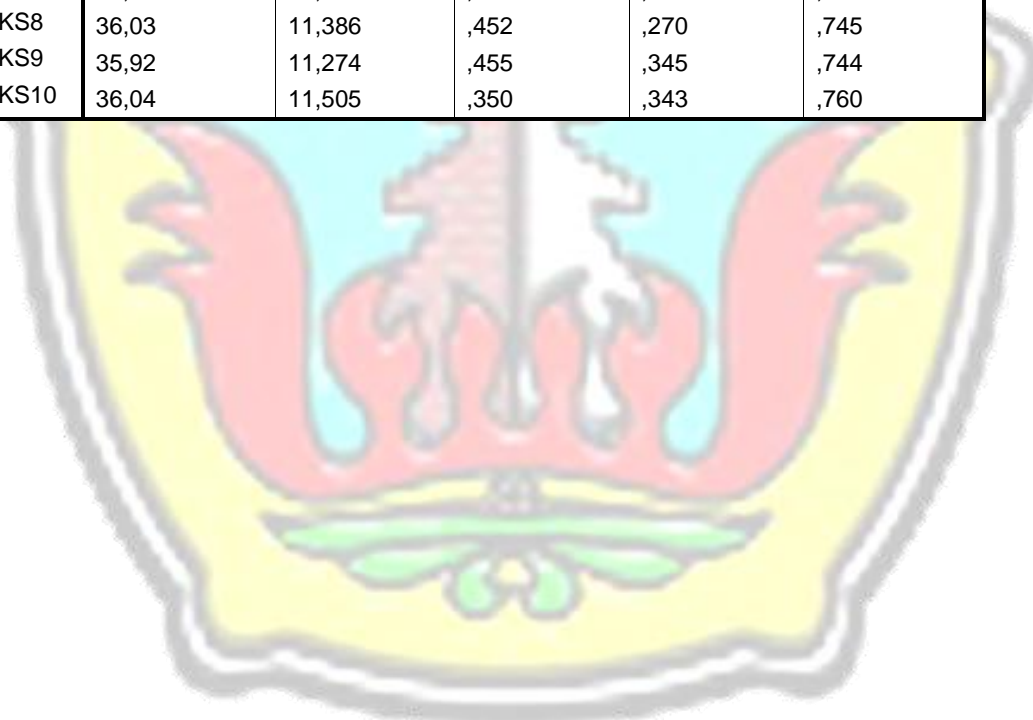
### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,995	3,908	4,171	,263	1,067	,009	10

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KS1	35,86	12,605	,290	,141	,763
KS2	35,78	12,016	,306	,292	,764
KS3	35,87	11,156	,559	,405	,732
KS4	36,03	11,973	,326	,185	,761
KS5	36,03	10,613	,559	,401	,728
KS6	35,97	11,226	,487	,331	,740
KS7	36,01	10,786	,526	,347	,734
KS8	36,03	11,386	,452	,270	,745
KS9	35,92	11,274	,455	,345	,744
KS10	36,04	11,505	,350	,343	,760





## Lampiran

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X2

#### Correlations

	PTI1	PTI2	PTI3	PTI4	PTI5	PTI6	PTI7	PTI8	Total
PTI1 Pearson Correlation	1	,528(**)	,487(**)	,346(**)	,202	,240(*)	,340(**)	,432(**)	,668(**)
Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,002	,080	,037	,003	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI2 Pearson Correlation	,528(**)	1	,444(**)	,366(**)	,382(**)	,363(**)	,123	,131	,608(**)
Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,001	,001	,001	,288	,258	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI3 Pearson Correlation	,487(**)	,444(**)	1	,468(**)	,275(*)	,366(**)	,511(**)	,536(**)	,762(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000	,016	,001	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI4 Pearson Correlation	,346(**)	,366(**)	,468(**)	1	,503(**)	,449(**)	,595(**)	,386(**)	,754(**)
Sig. (2-tailed)	,002	,001	,000	.	,000	,000	,000	,001	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI5 Pearson Correlation	,202	,382(**)	,275(*)	,503(**)	1	,636(**)	,255(*)	,157	,606(**)
Sig. (2-tailed)	,080	,001	,016	,000	.	,000	,026	,175	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI6 Pearson Correlation	,240(*)	,363(**)	,366(**)	,449(**)	,636(**)	1	,410(**)	,263(*)	,661(**)
Sig. (2-tailed)	,037	,001	,001	,000	,000	.	,000	,022	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI7 Pearson Correlation	,340(**)	,123	,511(**)	,595(**)	,255(*)	,410(**)	1	,630(**)	,717(**)
Sig. (2-tailed)	,003	,288	,000	,000	,026	,000	.	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PTI8 Pearson Correlation	,432(**)	,131	,536(**)	,386(**)	,157	,263(*)	,630(**)	1	,666(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,258	,000	,001	,175	,022	,000	.	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Total Pearson Correlation	,668(**)	,608(**)	,762(**)	,754(**)	,606(**)	,661(**)	,717(**)	,666(**)	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	.
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability

##### Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	76	100,0
Excluded(a)	0	,0
Total	76	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,834	,835	8

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PTI1	3,95	,798	76
PTI2	4,33	,737	76
PTI3	3,92	,813	76
PTI4	4,01	,774	76
PTI5	4,16	,713	76
PTI6	4,08	,648	76
PTI7	3,63	,763	76
PTI8	3,76	,814	76

### Inter-Item Correlation Matrix

	PTI1	PTI2	PTI3	PTI4	PTI5	PTI6	PTI7	PTI8
PTI1	1,000	,528	,487	,346	,202	,240	,340	,432
PTI2	,528	1,000	,444	,366	,382	,363	,123	,131
PTI3	,487	,444	1,000	,468	,275	,366	,511	,536
PTI4	,346	,366	,468	1,000	,503	,449	,595	,386
PTI5	,202	,382	,275	,503	1,000	,636	,255	,157
PTI6	,240	,363	,366	,449	,636	1,000	,410	,263
PTI7	,340	,123	,511	,595	,255	,410	1,000	,630
PTI8	,432	,131	,536	,386	,157	,263	,630	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,980	3,632	4,329	,697	1,192	,048	8

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PTI1	27,89	13,322	,538	,429	,818
PTI2	27,51	13,933	,476	,466	,826
PTI3	27,92	12,634	,658	,485	,801
PTI4	27,83	12,864	,654	,521	,803
PTI5	27,68	14,032	,478	,495	,825
PTI6	27,76	13,970	,558	,489	,816
PTI7	28,21	13,155	,606	,593	,809
PTI8	28,08	13,274	,532	,500	,819

## Lampiran

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X3

#### Correlations

	PIA1	PIA2	PIA3	PIA4	PIA5	PIA6	PIA7	PIA8	PIA9	Total
PIA1 Pearson Correlation	1	,386(**)	,491(**)	,485(**)	,464(**)	,494(**)	,416(**)	,253(*)	,464(**)	,600(**)
Sig. (2-tailed)	.	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,028	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA2 Pearson Correlation	,386(**)	1	,772(**)	,703(**)	,780(**)	,660(**)	,559(**)	,336(**)	,524(**)	,793(**)
Sig. (2-tailed)	,001	.	,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA3 Pearson Correlation	,491(**)	,772(**)	1	,854(**)	,813(**)	,787(**)	,653(**)	,458(**)	,731(**)	,905(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA4 Pearson Correlation	,485(**)	,703(**)	,854(**)	1	,894(**)	,782(**)	,632(**)	,455(**)	,725(**)	,910(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	.	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA5 Pearson Correlation	,464(**)	,780(**)	,813(**)	,894(**)	1	,780(**)	,588(**)	,415(**)	,623(**)	,889(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	.	,000	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA6 Pearson Correlation	,494(**)	,660(**)	,787(**)	,782(**)	,780(**)	1	,829(**)	,519(**)	,774(**)	,908(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	.	,000	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA7 Pearson Correlation	,416(**)	,559(**)	,653(**)	,632(**)	,588(**)	,829(**)	1	,592(**)	,788(**)	,821(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	.	,000	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA8 Pearson Correlation	,253(*)	,336(**)	,458(**)	,455(**)	,415(**)	,519(**)	,592(**)	1	,407(**)	,611(**)
Sig. (2-tailed)	,028	,003	,000	,000	,000	,000	,000	.	,000	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
PIA9 Pearson Correlation	,464(**)	,524(**)	,731(**)	,725(**)	,623(**)	,774(**)	,788(**)	,407(**)	1	,823(**)
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	.	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Total Pearson Correlation	,600(**)	,793(**)	,905(**)	,910(**)	,889(**)	,908(**)	,821(**)	,611(**)	,823(**)	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	.
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability

##### Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	76	100,0
Excluded(a)	0	,0
Total	76	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,932	,933	9

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PIA1	4,08	,669	76
PIA2	4,20	,766	76
PIA3	4,13	,699	76
PIA4	4,22	,932	76
PIA5	4,20	,938	76
PIA6	4,08	,707	76
PIA7	4,08	,648	76
PIA8	3,96	,807	76
PIA9	4,00	,730	76

### Inter-Item Correlation Matrix

	PIA1	PIA2	PIA3	PIA4	PIA5	PIA6	PIA7	PIA8	PIA9
PIA1	1,000	,386	,491	,485	,464	,494	,416	,253	,464
PIA2	,386	1,000	,772	,703	,780	,660	,559	,336	,524
PIA3	,491	,772	1,000	,854	,813	,787	,653	,458	,731
PIA4	,485	,703	,854	1,000	,894	,782	,632	,455	,725
PIA5	,464	,780	,813	,894	1,000	,780	,588	,415	,623
PIA6	,494	,660	,787	,782	,780	1,000	,829	,519	,774
PIA7	,416	,559	,653	,632	,588	,829	1,000	,592	,788
PIA8	,253	,336	,458	,455	,415	,519	,592	1,000	,407
PIA9	,464	,524	,731	,725	,623	,774	,788	,407	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,105	3,961	4,224	,263	1,066	,008	9

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PIA1	32,87	27,236	,515	,283	,936
PIA2	32,75	25,070	,732	,698	,924
PIA3	32,82	24,686	,878	,823	,916
PIA4	32,72	22,656	,873	,867	,915
PIA5	32,75	22,830	,844	,863	,918
PIA6	32,87	24,596	,881	,834	,916
PIA7	32,87	25,742	,777	,803	,923
PIA8	32,99	26,413	,508	,407	,938
PIA9	32,95	25,091	,773	,756	,922



## Lampiran

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL Y1

#### Correlations

		KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	KA7	Total
KA1	Pearson Correlation	1	,592(**)	,521(**)	,454(**)	,589(**)	,556(**)	,620(**)	,818(**)
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
KA2	Pearson Correlation	,592(**)	1	,697(**)	,453(**)	,534(**)	,523(**)	,432(**)	,793(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
KA3	Pearson Correlation	,521(**)	,697(**)	1	,588(**)	,408(**)	,471(**)	,267(*)	,741(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000	,000	,000	,020	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
KA4	Pearson Correlation	,454(**)	,453(**)	,588(**)	1	,506(**)	,405(**)	,416(**)	,710(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	.	,000	,000	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
KA5	Pearson Correlation	,589(**)	,534(**)	,408(**)	,506(**)	1	,483(**)	,645(**)	,774(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	.	,000	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
KA6	Pearson Correlation	,556(**)	,523(**)	,471(**)	,405(**)	,483(**)	1	,630(**)	,762(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	.	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
KA7	Pearson Correlation	,620(**)	,432(**)	,267(*)	,416(**)	,645(**)	,630(**)	1	,748(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,020	,000	,000	,000	.	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	,818(**)	,793(**)	,741(**)	,710(**)	,774(**)	,762(**)	,748(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	.
	N	76	76	76	76	76	76	76	76

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	76	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,881	,881	7

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KA1	3,92	,845	76
KA2	4,12	,765	76
KA3	4,11	,776	76
KA4	4,00	,730	76
KA5	3,99	,721	76
KA6	4,00	,766	76
KA7	4,05	,746	76

### Inter-Item Correlation Matrix

	KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	KA7
KA1	1,000	,592	,521	,454	,589	,556	,620
KA2	,592	1,000	,697	,453	,534	,523	,432
KA3	,521	,697	1,000	,588	,408	,471	,267
KA4	,454	,453	,588	1,000	,506	,405	,416
KA5	,589	,534	,408	,506	1,000	,483	,645
KA6	,556	,523	,471	,405	,483	1,000	,630
KA7	,620	,432	,267	,416	,645	,630	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,026	3,921	4,118	,197	1,050	,005	7

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KA1	24,26	11,796	,729	,558	,856
KA2	24,07	12,356	,706	,597	,859
KA3	24,08	12,634	,635	,629	,868
KA4	24,18	13,032	,602	,450	,872
KA5	24,20	12,694	,686	,540	,862
KA6	24,18	12,552	,663	,508	,864
KA7	24,13	12,729	,648	,620	,866

## Lampiran

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL Y2

#### Correlations

		KW1	KW2	KW3	Total
KW1	Pearson Correlation	1	,462(**)	,489(**)	,820(**)
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,000
	N	76	76	76	76
KW2	Pearson Correlation	,462(**)	1	,599(**)	,827(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000
	N	76	76	76	76
KW3	Pearson Correlation	,489(**)	,599(**)	1	,820(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000
	N	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	,820(**)	,827(**)	,820(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	.
	N	76	76	76	76

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100,0
	Excluded(a)	0	,0
	Total	76	100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,751	,762	3

##### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KW1	3,88	,765	76
KW2	3,86	,667	76
KW3	4,05	,586	76

#### Inter-Item Correlation Matrix

	KW1	KW2	KW3
KW1	1,000	,462	,489
KW2	,462	1,000	,599
KW3	,489	,599	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

#### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,930	3,855	4,053	,197	1,051	,011	3

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KW1	7,91	1,258	,531	,284	,745
KW2	7,93	1,369	,602	,396	,642
KW3	7,74	1,503	,632	,416	,628



## Lampiran

### UJI REGRESI PERTAMA

#### NPar Tests 1

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,68706598
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,064
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		,760
Asymp. Sig. (2-tailed)		,610

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Uji Heteroskedastisitas 1

##### Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,245	2,584		-,482	,631
Kapasitas SDM	,099	,066	,204	1,500	,138
Pemanfaatan TI	,022	,087	,050	,250	,803
Pengendalian Intern Akuntansi	-,039	,059	-,120	-,656	,514

a. Dependent Variable: Abs1

#### Regression 1

##### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengendalian Intern Akuntansi, Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI(a)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,754(a)	,569	,551	2,742	1,537

a Predictors: (Constant), Pengendalian Intern Akuntansi, Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI

b Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	713,897	3	237,966	31,639	,000(a)
	Residual	541,524	72	7,521		
	Total	1255,421	75			

a Predictors: (Constant), Pengendalian Intern Akuntansi, Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI

b Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,919	3,953		,739	,463		
	Kapasitas SDM	,066	,101	,060	,653	,516	,712	1,404
	Pemanfaatan TI	,279	,133	,282	2,094	,040	,330	3,027
	Pengendalian Intern Akuntansi	,372	,090	,508	4,118	,000	,393	2,544

a Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

### Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Kapasitas SDM	Pemanfaatan TI	Pengendalian Intern Akuntansi
1	1	3,974	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,017	15,186	,06	,11	,02	,23
	3	,006	26,236	,43	,11	,37	,16
	4	,003	39,500	,51	,78	,61	,60

a Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

### Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	Keterandalan Pelaporan Keuangan
19	3,607	30
58	-3,338	24

a Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

### Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19,53	34,12	28,18	3,085	76
Std. Predicted Value	-2,804	1,924	,000	1,000	76
Standard Error of Predicted Value	,323	1,242	,590	,221	76
Adjusted Predicted Value	18,41	33,98	28,19	3,087	76
Residual	-9,153	9,892	,000	2,687	76
Std. Residual	-3,338	3,607	,000	,980	76
Stud. Residual	-3,466	3,904	-,001	1,020	76
Deleted Residual	-9,874	11,587	-,006	2,918	76
Stud. Deleted Residual	-3,771	4,366	,000	1,062	76
Mahal. Distance	,053	14,403	2,961	3,122	76
Cook's Distance	,000	,653	,023	,080	76
Centered Leverage Value	,001	,192	,039	,042	76

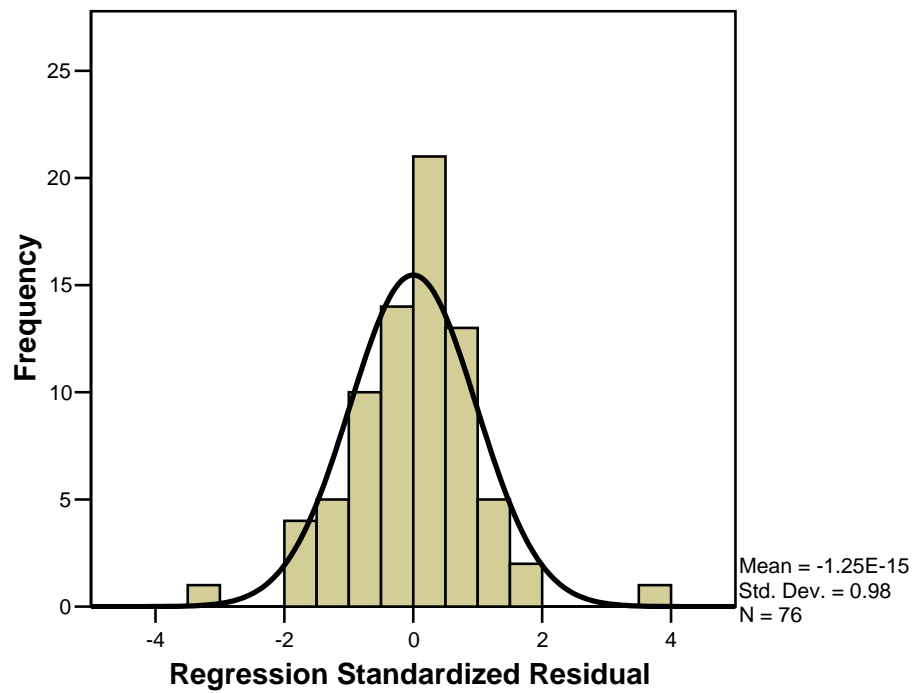
a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan



## Charts

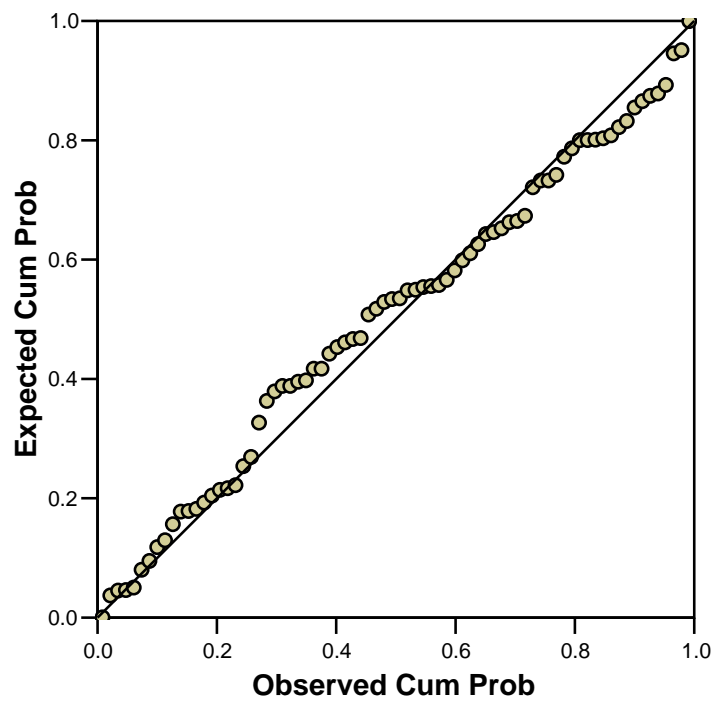
### Histogram

**Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan**



## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

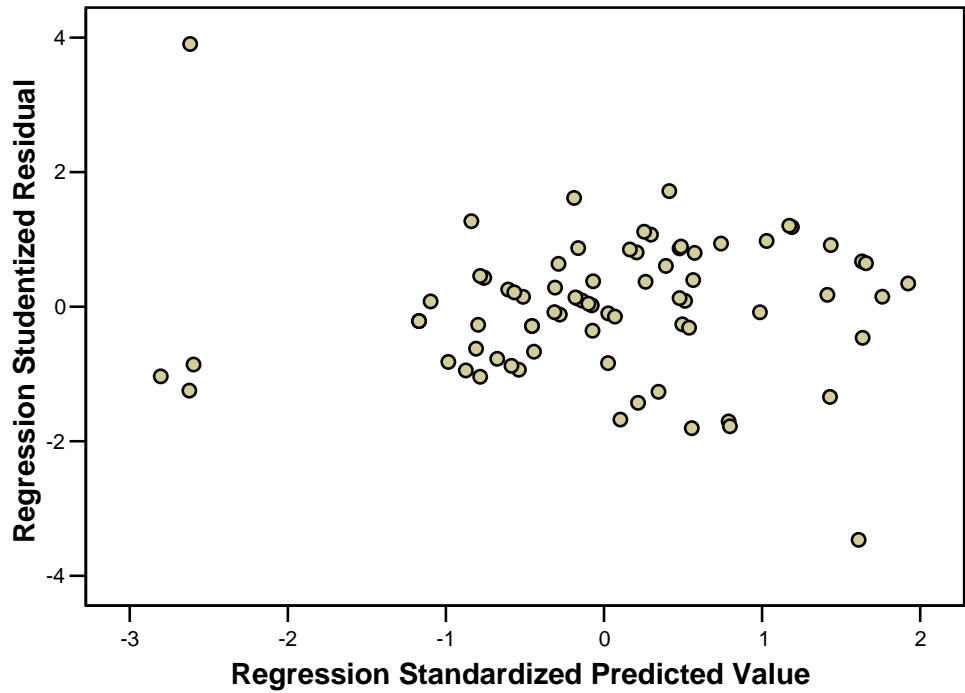
Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan





Scatterplot

Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan



## Lampiran

### HASIL ANALISIS REGRESI KEDUA

#### NPar Tests 2

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,21088116
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,040
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,665
Asymp. Sig. (2-tailed)		,768

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Uji Heteroskedastisitas 2

##### Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,291	,940		1,374	,174
Kapasitas SDM	-,017	,024	-,087	-,682	,497
Pemanfaatan TI	,011	,022	,064	,501	,618

a. Dependent Variable: Abs2

#### Regression

##### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemanfaatan TI, Kapasitas SDM(a)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

##### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,684(a)	,468	,453	1,227	1,773

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan TI, Kapasitas SDM

b. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96,664	2	48,332	32,084	,000(a)
	Residual	109,967	73	1,506		
	Total	206,632	75			

a Predictors: (Constant), Pemanfaatan TI, Kapasitas SDM

b Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,519	1,618		,321	,749		
	Kapasitas SDM	,104	,042	,233	2,499	,015	,838	1,193
	Pemanfaatan TI	,223	,037	,556	5,961	,000	,838	1,193

a Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

### Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Kapasitas SDM	Pemanfaatan TI
1	1	2,987	1,000	,00	,00	,00
	2	,009	18,011	,17	,10	,99
	3	,004	26,616	,83	,90	,01

a Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

### Residuals Statistics(a)

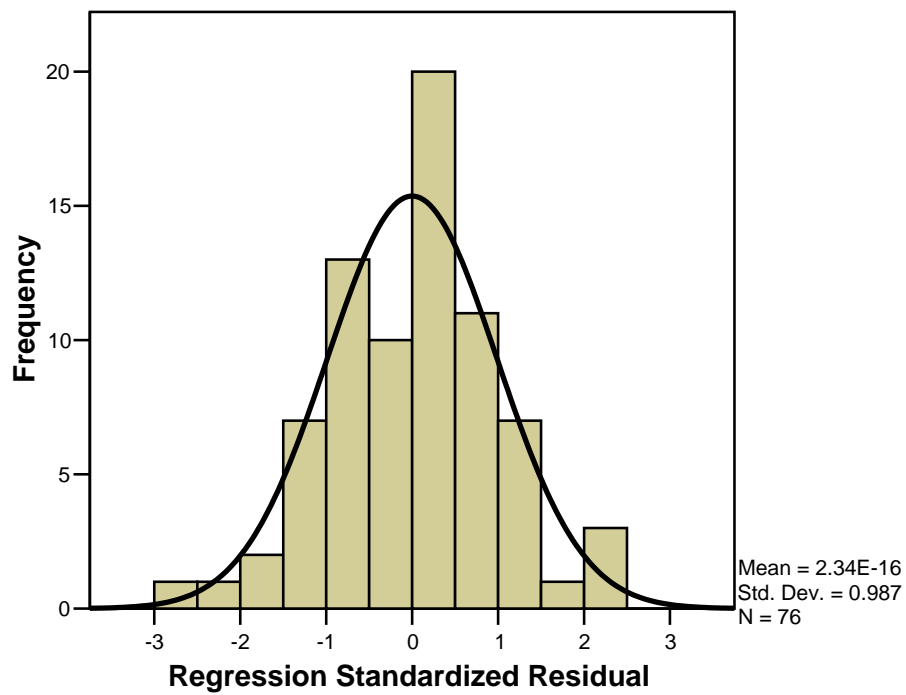
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9,45	14,66	11,79	1,135	76
Std. Predicted Value	-2,062	2,527	,000	1,000	76
Standard Error of Predicted Value	,141	,542	,229	,086	76
Adjusted Predicted Value	9,50	14,61	11,80	1,126	76
Residual	-3,274	2,917	,000	1,211	76
Std. Residual	-2,667	2,377	,000	,987	76
Stud. Residual	-2,728	2,439	-,004	1,007	76
Deleted Residual	-3,426	3,073	-,010	1,263	76
Stud. Deleted Residual	-2,859	2,528	-,004	1,022	76
Mahal. Distance	,001	13,661	1,974	2,532	76
Cook's Distance	,000	,131	,015	,026	76
Centered Leverage Value	,000	,182	,026	,034	76

a Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

## Charts

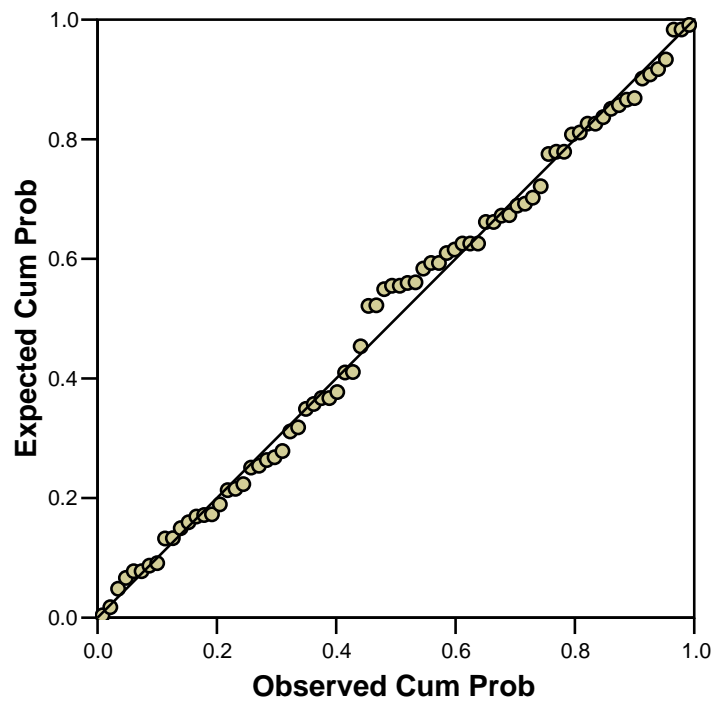
### Histogram

**Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan**



## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

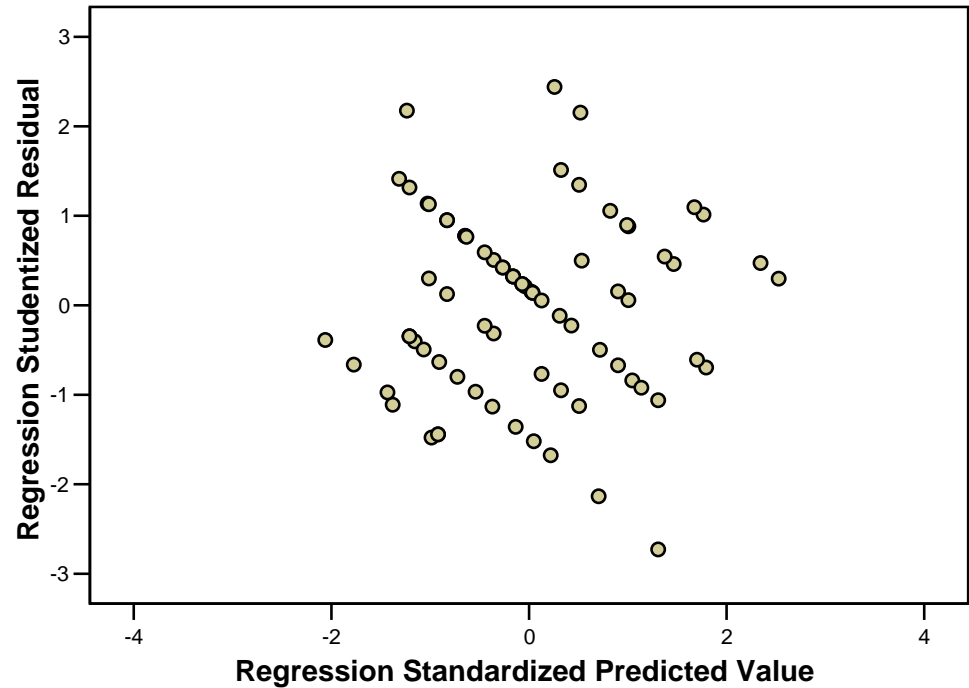
Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan





Scatterplot

Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan



## KUESIONER

**SAYA BERHARAP BAPAK/IBU BERKENAN UNTUK MENGISI KUESIONER INI BERDASARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA. KERAHASIAAN TERJAMIN.**

A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang / check list (V) pada pertanyaan pilihan.

### Demografi Responden

1. Nama : ..... (Boleh tidak diisi)
2. Umur : ..... Tahun
3. Jenis kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
4. Jabatan :  
.....
5. Berapa lama anda menduduki posisi saat ini? .....  
Tahun
6. Tingkat Pendidikan:  
☐ SMU  
☐ Diploma (sebutkan: ☐ D1 ☐ D2 ☐ D3)  
☐ S1  
☐ S2  
☐ Lain-lain, sebutkan .....
7. Status: ☐ Kawin ☐ Belum Kawin
8. Pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pernah diikuti : .....

B. Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan Bapak/Ibu

Kriteria penilaian:

(1) STS = Sangat Tidak Setuju

(2) TS = Tidak Setuju

(3) R = Ragu-ragu

(4) S = Setuju

(5) SS = Sangat Setuju

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.	Subbagian keuangan akuntansi anda memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.					
2.	Paling tidak 10 persen dari staf subbagian keuangan/akuntansi anda merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.					
3.	Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.					
4.	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.					
5.	Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.					
6.	Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.					
7.	Subbagian keuangan/akuntansi anda telah melaksanakan proses akuntansi.					

8.	Subbagian keuangan akuntansi anda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.					
9.	Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.					
10.	Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.					
11.	Subbagian akuntansi/keuangan anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas					
12.	Jaringan Internet telah terpasang di unit kerja anda.					
13.	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
14.	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
15.	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
16.	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
17.	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
18.	Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					
19.	Subbagian keuangan/akuntansi anda menye-					

	lenggarakan sistem akuntansi yang meliputi : a. Prosedur akuntansi penerimaan kas b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas c. Prosedur akuntansi aset d. Prosedur akuntansi selain kas					
20.	Daftar rekening ( <i>chart of account</i> ) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.					
21.	Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.					
22.	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
23.	Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.					
24.	Catatan akuntansi dijaga untuk tetap " <i>up-to-date</i> ".					
25.	Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.					
26.	Sistem akuntansi yang ada memungkinkan audit/ <i>transaction trail</i> .					
27.	Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.					
28.	Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
29.	Neraca disajikan.					
30.	Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.					
31.	Catatan atas laporan keuangan disajikan					



32.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.					
33.	Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.					
34.	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
35.	Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.					
36.	Laporan-laporan sering disediakan secara sistematis dan teratur, misal : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu).					
37.	<p>Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan realisasi semester pertama</li> <li>b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD</li> <li>c. Neraca</li> <li>d. Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ul>					